

PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA BALAI BAHASA PROVINSI SUMATERA UTARA)

Ayu Permata Sari

Jurusan Akuntansi Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara
email: permataayu819@gmail.com

Nurlaila

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara
email: nurlaila@uinsu.ac.id

<i>Informasi Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<i>Tanggal Masuk: 17 Maret 2022</i>	<i>The purpose of this study was to determine the effect of the the quality of financial statements on the performance accountability of government agencies (a case study at the Language Center of North Sumatra Province). This type of research is causality. The data used are primary data and secondary data. Sampling is done by saturated sample or census. Data collection techniques using interview, questionnaire and documentation techniques. The analytical method used is simple linear regression. The result of this study indicate that the Quality ogf Financial Statements Agencies</i>
<i>Tanggal Revisi: 29 April 2022</i>	
<i>Tanggal Diterima: 22 Mei 2022</i>	
<i>Publikasi On line: 02 Juli 2022</i>	<i>Keywords: Quality of Financial Report, performance Accountability of Government Agencies</i>
	<i>Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (Studi Kasus Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara). Jenis Penelitian ini adalah Kausalitas. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengambilan sampel dilakukan dengan sampel jenuh atau sensus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara, Kuesioner dan Dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu menggunakan regresi linier sederhana. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan secara signifikan memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan</i>
	<i>Kata Kunci: Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</i>

PENDAHULUAN

Pemerintahan sebagai organisasi yang bergerak dibidang jasa pelayanan atau administrasi publik, di dalam pengelolaanya harus dapat melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik (Pertanggungjawaban publik) merupakan kewajiban pihak Pemegang amanah atau *agent* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan juga mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah atau *principal* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Semua instansi atau organisasi Pemerintah, badan maupun lembaga Negara baik di pusat dan juga daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing harus memahami lingkup Akuntabilitas atau pertanggungjawabannya masing-masing. Oleh karena Akuntabilitas yang diminta keberhasilan dan juga kegagalan dalam pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan (Herman, 2020). Berdasarkan SK Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 pada tanggal 25 maret 2003 tentang pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (*Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi*, 2003). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat AKIP merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk dapat meningkatkan pelaksanaan

Pemerintah yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab tentunya (*Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*). Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah adalah alat yang di gunakan untuk melaksanakan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu dari prasyarat untuk terciptanya Pemerintahan yang baik dan juga terpercaya tentunya (Setyowati & Isthika, 2014). Berdasar dengan amanat Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau yang disingkat SAP. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Dengan demikian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prasyarat yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan (*Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, 2012*). Laporan Keuangan dapat di katakan berkualitas apabila Laporan Keuangan disajikan setiap tahunnya mendapatkan Penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ketika BPK (Bapan Pemeriksa Keuangan) memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan, sehingga dapat dikatakan jika Laporan Keuangan suatu entitas Pemerintah tersebut di sajikan dan juga di ungkapkan secara Wajar serta berkualitas (Indriasih, 2014). Fenomena yang terjadi pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU) seperti yang disajikan dalam Laporan Kinerja Balai Bahasa Provinsi Sumatera Tahun 2021 adalah ketidakpatuhan dalam penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah yang tidak tepat waktu. Laporan Keuangan pada dasarnya di gunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan, maka dari itu Laporan Keuangan Pemerintah harus di sajikan secara tepat waktu dan dapat diandalkan. Dimana Kualitas Pelaporan Keuangan secara jelas telah di jabarkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan yang saat ini menjadi Peraturan Pemerintah NO. 71 Tahun 2010 bahwa Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah dapat memenuhi Kualitas yang di kehendaki jika memenuhi unsur Kualitatif Laporan Keuangan ialah ukuran-ukuran normatif yang harus di wujudkan dalam informasi Akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya di antaranya Pelaporan Keuangan tersebut telah memenuhi unsur Relevan, Andal, Dapat di bandingkan dan Dapat di pahami. Menurut beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Nining Asniar Ridzal (2020) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Bangun Prasajo Suwardana (2021) menunjukkan Kualitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Oleh karena itu Peneliti tertarik dan melakukan Penelitian dengan Judul "Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara)". Adapun tujuan dari Penelitian ini ialah untuk mengetahui Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU). Penelitian ini nantinya di harapkan agar Balai Bahasa Provinsi Sumatera (BBPSU) dapat terus meningkatkan Kualitas Laporan Keuangannya untuk menjaga serta meningkatkan Akuntabilitas Kinerja setiap Pegawai Instansi Pemerintah untuk memastikan bahwa kekuasaan telah di arahkan untuk mencapai tujuan nasional yang lebih luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan Kebijaksanaan Tertinggi.

TINJAUAN PUSTAKA/KAJIAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Berhubungan dengan masalah keagenan, Akuntabilitas kinerja dalam organisasi sektor publik adalah suatu konsep yang di dasari dari teori keagenan (Santoso, 2015). Dalam Pelaporan Keuangan, Pemerintah yang bertindak sebagai *Agent* mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan. Pemerintah yang bertindak sebagai *Principal* dalam menilai Akuntabilitas dan membuat keputusan, baik itu keputusan ekonomi, social maupun politik (Safitri et al., 2015). Dalam suatu Pemerintahan demokrasi, hubungan antara Pemerintah dan juga para pengguna Informasi keuangan Pemerintah dapat di ilustrasikan sebagai suatu hubungan keagenan (*Agency Relationship*), dalam hal ini Pemerintah berfungsi sebagai *agent* yang di beri kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna Informasi keuangan Pemerintah sebagai *Principal*, baik itu secara langsung maupun tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan Pemerintah sebagai *agent* harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna Informasi Keuangan Pemerintah sebagai *Principal* (Zeyn, 2011).

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan sektor publik adalah komponen penting untuk menciptakan Akuntabilitas sektor publik, adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan Akuntabilitas publik menimbulkan implikasi untuk manajemen sektor publik dalam memberikan informasi kepada publik salah satunya ialah informasi Akuntansi yang berupa Laporan Keuangan (Langelo et al., 2015). Akuntansi sektor publik mempunyai peran penting dalam menyiapkan Laporan Keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Akuntabilitas publik. Untuk dapat menciptakan Akuntabilitas maka Laporan Keuangan yang disampaikan juga harus berkualitas. Kualitas Laporan Keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu di wujudkan dalam Informasi Akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Laporan Keuangan digunakan sebagai dasar dalam Pengambilan Keputusan, maka laporan keuangan Pemerintah harus disajikan dengan tepat waktu dan dapat diandalkan. Selain itu, Laporan Keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat memengaruhi Pengambilan Keputusan (Lestari & Dewi, 2020). Laporan Keuangan organisasi sektor publik di buat tentunya mempunyai tujuan dan fungsi secara umum bagi organisasi Pemerintahan, antara lain (Mardiasmo, 2018). Untuk memberikan Informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, social, dan politik serta sebagai bukti pertanggungjawaban (*Accountability*) dan pengelolaan (*Stewardship*); Dan untuk memberikan informasi yang di gunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Karakteristik dari Kualitas Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu di wujudkan dalam informasi Akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini adalah prasyarat normatif yang diperlukan agar Laporan Keuangan Pemerintah dapat memenuhi Kualitas yang dikehendakii Relevan, Andal, Dapat di bandingkan dan Dapat di pahami (Nugraeni dan Budiantara, 2015).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kata Akuntabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *Accountability* yang artinya keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, itulah alasannya, Akuntabilitas menggambarkan suatu keadaan ataupun kondisi yang dapat di pertanggungjawabkan (Dodi Fs Lumentut, Sahmin Noholo, 2014). Pengertian lain dari , Akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah di tetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik (Nordawan, 2008). Akuntabilitas atau *Accountability* merupakan konsep yang lebih luas dari *Stewardship*. *Stewardship* sendiri mengacu kepada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa di bebani kewajiban untuk melaporkan sedangkan *Accountability* lebih mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *Steward* kepada pemberi tanggung jawab (Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas atau Pertanggungjawaban merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi (Turner dan Hulme dalam Mardiasmo, 2018) . Terwujudnya Akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik (Pujanira & Taman, 2017). Tuntutan Akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban vertikal (*Vertical Accountability*), tuntutan yang kemudian muncul yaitu perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Turner dan Hulme pada Mardiasmo, 2018). Akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu: (Mardiasmo, 2018) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*) dan Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*). Pengertian dari Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi suatu organisasi secara terukur dengan sasaran ataupun target yang telah di tetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di susun secara periodik (*Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, n.d.). Perwujudan Pertanggungjawaban (Akuntabilitas) kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk Laporan yang disebut dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat dengan LAKIP. Alat untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP (*Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, n.d.)

Berdasar Inpres No. 7 Tahun 1999 di atas maka secara singkat Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau yang disingkat dengan SAKIP dituangkan dalam Renstra (Perencanaan Strategis) dan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada dasarnya adalah instrumen yang digunakan instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk dapat mempertanggungjawabkan Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Terdiri dari berbagai

komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu Perencanaan Startejik, Prencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja (Keputusan Kepala LAN No. 293/XI/6/8/2003).

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan Nining Asniar Ridzal (2020) menunjukkan bahwa Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Bangun Prasajo Suwardana (2021) menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehingga hipotesis yang dihasilkan yaitu:

Ho = Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU)

Ha = Kualitas Laporan Keuangan Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU)

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Penelitian kausalitas yaitu jenis penelitian yang di susun untuk meneliti kemungkinan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel dan juga untuk mengetahui Nilai pengaruh variabel kualitas laporan keuangan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan dat sekunder. Penelitian ini dilaksanakan di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU), Waktu penelitian pada bulan Januari sampai bulan Februari selama satu bulan. Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh Pegawai Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU) yang terdiri dari 35 pegawai/responden. Sampel yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teknik sampling jenuh atau sensus yaitu semua populasi dijadikan sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Teknik wawancara tidak terstruktur yang dilakukan dengan menanyakan sejumlah pertanyaan kepada salah satu Pegawai Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU). Teknik kuesioner dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis dengan menyebar kuesioner kepada Kantor Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU) sedangkan Teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data Laporan Kinerja dari situs resmi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU) balaibahasasumut.kemdikbud.go.id. Instrumen Penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena yang diamati (Sugiyono, 2010). Teknik skala pengukuran instrument dalam Penelitian ini menggunakan *Skala Likert*.

Tabel 1.

Skor Skala Likert

Jawaban	Pernyataan Positif	Pernyataan Negatif
Sangat Setuju (SS)	5	1
Setuju (S)	4	2
Netral (N)	3	3
Tidak Setuju (TS)	2	4
Sangat Tidak Setuju (STS)	1	5

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan, Variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut adalah indikator yang digunakan sebagai acuan mengenai Pengaruh yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada pada penelitian ini, berikut ini merupakan tabel definisi operasional:

Tabel 2.

Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Kualitas Laporan Keuangan (X)	Kualitas Laporan Keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi Akuntansi	a. Relevan	Skala
		b. Andal	Ordinal
		c. Dapat dibandingkan	
		d. Dapat dipahami	

	sehingga dapat memenuhi tujuannya.			
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.	a. Perencanaan Strategik	b. Perencanaan Kinerja	c. Pengukuran Kinerja
		d. Pelaporan Kinerja		Skala Ordinal

Sumber : Penulis, 2022

Teknik Analisis Data

1. Uji Validitas

Uji Validitas kuesioner biasanya dimaksud ialah validitas item yang dimaksudkan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuesioner apakah sudah tepat dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item yang valid dibuktikan dengan adanya korelasi yang signifikan antara item terhadap skor total item. Untuk penentuan apakah suatu item layak digunakan atau tidak, yaitu dengan melakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05, maknanya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total item (Priyatno, 2016). Metode pengujian validitas pada SPSS yang dapat digunakan yaitu dengan metode korelasi pearson atau metode *Corrected item-Total Coreladon*. Nilai korelasi r hitung dibandingkan dengan r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan jumlah data (n) = 15 atau df (n-2) atau (15-2) maka, didapatkan r tabel sebesar 0,514 (Priyatno, 2016). Jadi, apabila r hitung lebih besar dari r tabel dinyatakan valid dan begitu sebaliknya jika Nilai r hitung lebih kecil dari r tabel maka dinyatakan tidak valid.

2. Uji Reabilitas

Uji Reabilitas digunakan guna mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Metode Uji Reabilitas yang digunakan dalam Penelitian ini adalah *Cronbach's Alpha*. Metode ini sangat tepat digunakan pada skor berbentuk skala (Misal 1-4, 1-5) atau skor rentangan (Misal 0-10, 0-30). Untuk penentuan apakah Instrumen reliable atau tidak, bisa digunakan batasan tertentu seperti 0,6 (Priyatno, 2016). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan *Cronbach's Alpha* > 0,70 (Ghozali, 2013).

3. Uji Hipotesis

Uji Hipotesis secara parsial/Individu atau Uji t Pengujian hipotesis secara Parsial/Individu merupakan Pengujian Hipotesis Koefisien regresi sederhana dengan hanya satu B (B1 atau B2) yang memengaruhi Y.

4. Koefisien Determinasi

Uji Determinasi bertujuan untuk menentukan proporsi atau persentasi total variasi dalam variabel terikat yang diterangkan oleh variabel bebas. Karena analisis yang digunakan ialah regresi sederhana, oleh sebab itu yang digunakan ialah Nilai *R Square*.

5. Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi Linear Sederhana terdiri atas dua Variabel. Satu variabel berupa Variabel terikat atau tergantung di beri simbol Y dan Variabel kedua berupa Variabel Bebas di beri simbol X. Regresi sederhana ini menyatakan hubungan

Kausalitas antara dua Variabel dan memperkirakan Nilai Variabel terikat Nilai berdasarkan Nilai variabel bebas. Persamaan yang dipergunakan untuk memprediksi Nilai variabel Y disebut dengan Persamaan regresi.

HASIL PENELITIAN

1. Uji Validitas

Nilai r_{tabel} untuk populasi dalam Penelitian ini adalah sebanyak 35 responden dengan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi sebesar 5% dan $n= 35$ adalah 0,325. Jadi, apabila dihitung lebih kecil dari 0,325 maka, pernyataan tersebut dianggap tidak valid.

Kualitas Laporan Keuangan (X)

Hasil dari Pengujian Validitas dari butir pernyataan pada variabel Kualitas Laporan Keuangan (X) adalah sebagai berikut :

Tabel 3.
Hasil Pengujian Validitas Variabel X

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
1	0,709	0,325	Valid
2	0,746	0,325	Valid
3	0,791	0,325	Valid
4	0,739	0,325	Valid
5	0,730	0,325	Valid
6	0,757	0,325	Valid
7	0,663	0,325	Valid
8	0,833	0,325	Valid
9	0,874	0,325	Valid
10	0,841	0,325	Valid
11	0,820	0,325	Valid
12	0,675	0,325	Valid
13	0,682	0,325	Valid
14	0,669	0,325	Valid
15	0,875	0,325	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang dilakukan terhadap 15 butir pernyataan dari variabel Kualitas Laporan Keuangan (X) didapatkan hasil bahwa 15 butir pernyataan dinyatakan valid, dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau r_{hitung} lebih besar dari 0,325.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Hasil dari pengujian validitas dari butir pernyataan pada variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), ialah sebagai berikut :

Tabel 4.
Hasil Pengujian Validitas Variabel Y

Butir Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
1	0,584	0,325	Valid
2	0,756	0,325	Valid
3	0,779	0,325	Valid
4	0,624	0,325	Valid
5	0,594	0,325	Valid
6	0,739	0,325	Valid
7	0,758	0,325	Valid
8	0,679	0,325	Valid

9	0,761	0,325	Valid
10	0,463	0,325	Valid

Sumber : Hasil Pengolahan Data , 2022

Berdasarkan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan terhadap 10 butir pernyataan dari variabel Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (Y) didapatkan bahwa hasil butir pernyataan dinyatakan valid, karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau r_{hitung} lebih besar dari 0,325.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas ialah pengujian dengan cara mengkorelasikan skor ganjil dan skor genap. Hasil pengujian reabilitas yang dilakukan menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini reliable apabila Nilai *Cronbach's Alpha* item $>$ Nilai *Alpha*, maka reliable, sedangkan apabila Nilai *Cronbach's Alpha* item $<$ Nilai *Alpha* maka, tidak reliabel. Reabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan apabila 0,7 dapat diterima, dan 0,8 adalah baik.

Tabel 5.
Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>r tabel</i>	Status
X	0,948	0,7	Reliabel
Y	0,864	0,7	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

Berdasarkan hasil Uji Reliabilitas, maka Nilai *Cronbach's Alpha* dari masing-masing variabel lebih besar dari Nilai *r product moment* (r_{tabel}). Oleh karena itu, seluruh butir pernyataan dalam masing-masing variabel dinyatakan reliable.

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

Tabel 6.
Hasil Uji Regresi
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	8.610	3.002	
1 Kualitas Laporan Keuangan	.371	.070	.679

a. Dependent Variable : Akuntabilitas Kinerja

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2022

$$Y = a + b_1X_1$$

$$Y = 8,610 + 0,371$$

Dari persamaan regresi diatas menggambarkan bahwa:Nilai koefisien regresi Kualitas Laporan Keuangan (X) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) adalah sebesar 0,371 (37,1%), berarti bahwa Kualitas Laporan Keuangan (X) mempunyai hubungan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), yakni sebesar 37,1 % artinya apabila ada peningkatan Kualitas Laporan Keuangan (X) sebesar 100%, maka akan meningkatkan juga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar 37,1% begitu juga sebaliknya jika ada penurunan Kualitas Laporan Keuangan (X) sebesar 100%, maka akan menurunkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebesar 37,1%. Jadi Kualitas Laporan Keuangan berhubungan positif secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Uji Hipotesis t

Untuk menjawab Permasalahan bagaimana Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan (X) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), maka hasilnya diuji dengan menggunakan uji t dapat dilihat dari tabel 7 berikut :

**Tabel 7.
Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	8.610	3.002		2.868	.007
1 Kualitas Laporan Keuangan	.371	.070	.679	5.310	.000

a. Dependent Variable : Akuntabilitas Kinerja
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2022

Hasil uji Hipotesis menunjukkan bahwasannya diketahui Nilai t_{hitung} untuk variabel Kualitas Laporan Keuangan (X) sebesar 5,310 sedangkan Nilai t_{tabel} dengan taraf nyata (α) sebesar 0,05 (5%) serta $df = n-k-1$ ($35-1-1$) = 33 adalah sebesar 1,692. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima karena Nilai t_{hitung} 5,310 > t_{tabel} 1,692. Hasil uji Hipotesis individual untuk Variabel Kualitas Laporan Keuangan (X) menunjukkan bahwa variabel tersebut secara signifikan memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Nilai signifikansi X 0,000 < 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan secara signifikan memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Koefisien Determinasi

Analisis yang digunakan dalam Penelitian ini adalah regresi sederhana, karena analisis yang digunakan adalah regresi sederhana maka yang digunakan adalah Nilai *R Square* dapat dilihat pada tabel 8 berikut :

**Tabel 8.
Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.679 ^a	.461	.444	4.135

a. Predictors : (Constant), Kualitas Laporan Keuangan
b. Dependent Variable : Akuntabilitas Kinerja
Sumber : Hasil Pengolahan Data , 2022

Berdasarkan tabel 8 diatas diperoleh Nilai R Square 0,461 atau 46,1%, hasil ini menunjukkan bahwa 46,1% Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dipengaruhi oleh Variabel Kualitas Laporan Keuangan (X) sedangkan 53,9% dipengaruhi oleh faktor lain yaitu Akuntansi sektor publik dan anggaran berbasis kinerja.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan dapat memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU) Dari hasil pengujian Hipotesis secara parsial diketahui bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} . Maka, dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan (X) secara signifikan memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Hasil Penelitian ini membuktikan bahwa terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan syarat terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan terpercaya. Bentuk pertanggung jawaban atau Akuntabilitas kinerja Pemerintah salah satunya dengan menyajikan Laporan Keuangan yang berkualitas berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Laporan Keuangan Pemerintah dapat dikatakan berkualitas

apabila Laporan Keuangan memenuhi unsur Relevan, Andal, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP dan Pelaporan Keuangan yang disajikan tepat waktu diyakini akan berdampak terhadap peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah, yang berarti; Laporan keuangan pemerintahan akan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dan juga terwujudnya transparansi serta Akuntabilitas. Dari pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa Kualitas Laporan Keuangan dapat meningkatkan Akuntabilitas pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU), laporan keuangan yang berkualitas adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah dalam melaksanakan Akuntabilitas, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme Pertanggungjawaban atau Akuntabilitas dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dikarenakan laporan keuangan tersebut akan digunakan untuk pembuatan keputusan, maka Laporan Keuangan instansi Pemerintah perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat memengaruhi keputusan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nining Asniar Ridzal (2020) yang membuktikan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian Bangun Prasajo Suwardana (2021) yang mengatakan bahwa Kualitas Laporan keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang diperoleh bahwa Kualitas Laporan Keuangan (X) secara signifikan memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terciptanya Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah adalah syarat terciptanya penyelenggaraan Pemerintah yang baik. Bentuk pertanggungjawaban atau Akuntabilitas kinerja Pemerintah salah satunya dengan menyajikan Laporan Keuangan yang berkualitas. Dengan kata lain, apabila Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku dan dilaporkan tepat waktu maka akan menghasilkan Laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan pembahasan dan uraian diatas, maka Penulis memberikan saran bagi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (BBPSU), Diharapkan bagi para pegawai Akuntansi atau keuangan yang terlibat langsung dalam penyajian dan penyusunan Laporan Keuangan untuk dapat meningkatkan terus pemahaman dan penguasaan tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan serta untuk lebih memerhatikan ketepatan waktu dalam membuat Laporan Keuangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Kualitas Laporan Keuangan sangat penting guna meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, sehingga dengan berkualitasnya Laporan Keuangan yang disajikan maka, Pertanggungjawaban atau Akuntabilitas Kinerja Pemerintah juga meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dodi Fs Lumentut, Sahmin Noholo, A. L. (2014). *Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuanagan Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Gorontalo*. 12(2).
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Update PLS Regresi*. Universitas Diponegoro.
- Herman. (2020). Tinjauan Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kantor Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Mirai Managemnt*, 6(1), 271–291.
- Indriasih. (2014). The Effect of Government Apparatus Competence and the Effectiveness of Government Internal Control Toward the Quality of Financial Reporting in Local Government. *Research Journal of Finance and Accounting*, 5(20).
- Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. (n.d.).
Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi. (2003).
- Langelo, F., Saerang, D. P. E., & Alexander, S. W. (2015). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.6556>
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178. <https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1435.170-178>
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Ed.1). Yogyakarta: Andi.
- Nordiawan, D. (2008). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.

- Nugraeni, B. (2015). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas. *JDEB*, 12(1), 18–32. <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/jdeb.v12i1.376>
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. (2012). *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Priyatno, D. (2016). *SPSS Handbook*. Mediakom.
- Pujanira, P., & Taman, A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 6(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v6i2.16643>
- Ridzal, N. A. (2020). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton. *Financial : Jurnal Akuntansi*, Vol 6 No. 1.
- Safitri, D., Yusraini, Y., & Asri, F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(1), 14–32.
- Santoso, B. (2015). *Keagenan*. Ghalia Indonesia.
- Sanusi, A. (2011). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta.
- Setyowati, L., & Isthika, W. (2014). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Semarang. *Proceedings SNEB*, 5, 1–8.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta.
- Suwardana, B. P. (2021). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Universitas Pembangunan “Veteran” Jawa Timur.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1), 21. <https://doi.org/10.22219/jrak.v1i1.497>